

ABSTRAK

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKURAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Lampung)

Oleh:

Susanti Adettia Putri

Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang tidak optimal, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat; masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Hal ini mengharuskan pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan upaya lebih dalam menangani masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Di Provinsi Lampung sendiri masih belum terpublikasinya perencanaan dan penganggaran keuangan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis IPKD sebagai instrumen akuntabilitas keuangan daerah dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada akuntabilitas keuangan daerah Provinsi Lampung. Obyek penelitian ini dilakukan pada 3 perangkat daerah Provinsi Lampung yakni BAPPEDA, BPKAD dan BALITBANGDA. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui; observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen yang cukup baik dalam menerapkan prinsip - prinsip akuntabilitas keuangan daerah dengan melaksanakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Terdapat beberapa keterbukaan salah satunya dengan pemberian informasi keuangan daerah yang dilakukan melalui layanan SIPPKAD. Hambatan dalam pelaksanaannya seperti; masih belum adanya keseuaian rencana anggaran; saat proses penginputan data melalui aplikasi IPKD masih sering mengalami masalah teknis.

Kata Kunci: *IPKD, Akuntabilitas, Keuangan Daerah*

Abstract

Regional Financial Management Index (IPKD) As An Instrument For Measuring Regional Financial Accountability (Study of Lampung Provincial Government)

By:

Susanti Adettia Putri

The implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP) has not been optimal, such as the lack of awareness of the importance of information openness among government officials and the public; the high level of corruption in Indonesia that can obstruct the openness of information. This requires the government as policy makers to make more effort to address the above problems, one of the efforts is to issue Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2020 on the measurement of the regional financial management index. In the province of Lampung itself, the financial management and budgeting of the regional government has not been published. This study aims to analyze IPKD as an instrument of regional financial accountability and to identify barriers to the implementation of IPKD in the financial accountability of the Lampung Province government. The object of this research is carried out on 3 regional governments in Lampung Province, namely BAPPEDA, BPKAD and BALITBANGDA. The researcher uses qualitative research methods with data collection techniques through; observation, documentation, and interviews. The results of the study indicate that the Lampung Province government has committed enough to the implementation of the principles of regional financial accountability by implementing the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2020. There are several forms of openness, one of which is the provision of regional financial information through the SIPPKAD service. Barriers to implementation include; the lack of consistency in budget plans; technical problems still frequently occur during the data input process through the IPKD application.

Keywords: IPKD, Accountability, Regional Finance.